



Judul : Jalankan Dulu Rekomendasi Pansus Pelindo
Tanggal : Senin, 03 Juli 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

Jalankan Dulu Rekomendasi Pansus Pelindo

MIZSUSANTO

Aria Bima

Anggota Komisi VI DPR

DPR menilai membekunya hubungan Kementerian BUMN dengan DPR selama ini tidak ada kaitannya dengan Komisi VI. Menurutnya, Komisi VI dalam posisi menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo II yang sudah disepakati di dalam forum tertinggi di DPR yakni rapat paripurna. Salah satu rekomendasi pansus ialah pencopotan Rini Soemarno dari jabatan menteri BUMN.

Menteri BUMN menyatakan ingin memperbaiki komunikasi dengan Komisi VI DPR RI?

Tidak ada kaitannya dengan Komisi VI kok itu. Itu urusannya paripurna. Karena itu, keputusan paripurna, jadi kaitannya secara kelembagaan, dengan pimpinan DPR. Kita (Komisi VI) hanya menerima keputusan paripurna. Tidak mengerti apa-apa.

Selama dua tahun Menkeu mewakili Menteri BUMN di setiap rapat kerja di DPR. Apakah bisa berjalan efektif?

Substansinya berbeda. Tidak ada urusan berkualitas atau tidak. Itu sudah menjadi keputusan pansus, kita tidak bisa apa-apa. Berbeda kalau panja, instrumennya kan di komisi. Pansus tidak ada kaitannya dengan Komisi VI, dan pemerintah sudah menunjuk Menkeu mewakili Menteri BUMN.

Benarkah Komisi VI sudah mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk kembali membuka pintu kemitraan dengan Menteri BUMN?

Tidak ada yang komplain (di Komisi VI). Tidak ada suratnya juga. Saya sudah tanya ke Refrizal, aku kaget juga. Ada suratnya tidak? Ternyata tidak ada, tidak ada masalah. Tidak ada juga pembahasan (di internal).

Apa langkah politik yang bisa ditempuh untuk normalisasi hubungan?

Jadi pemberlakuannya masih berlaku sebelum ditinjau ulang di paripurna. Itu kan pansus sudah ketuk paripurna, harus paripurna kembali. Makanya harus ada penyelesaian politik. (Nov/P-4)